

Tantangan Investasi Jateng: Pembenahan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi

Oleh: Adi Ekopriyono
adiekopriyono@hotmail.com

ABSTRAKSI

The main challenges of local government (both Central Java provincial and district/city governments in Central Java) to increase investment, are: the infrastructure improvement and bureaucratic reform. It is recorded in the results of a series of competitiveness surveys, namely the Business Climate Survey (BCS) 2007, Regional Competitiveness Survey in Central Java 2010, Snapshot Survey 2011, and Investment Survey 2012. Therefore, provincial and district/city government should consistently prioritize the use of the budget for infrastructure improvements and reform the bureaucracy seriously, making conducive business climate. The improved investment performance will give a “multiplayer effect” on reducing unemployment and poverty.

Latar Belakang

Investasi merupakan faktor penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Peningkatan investasi akan memperluas lapangan kerja, sehingga mengurangi jumlah penganggur dan orang miskin.

Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi adalah “mempertemukan” aspirasi investor dengan kepentingan pemerintah daerah (di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota). Untuk mengetahui dan

memahami aspirasi investor dan potensi serta kebijakan pemerintah kabupaten/kota diperlukan survei yang merekam berbagai masalah yang dihadapi oleh investor dan pemerintah kabupaten/kota.

Secara hipotesis, selama ini terdapat kesenjangan antara kebutuhan investor dan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi Jateng. Hal itu tergambar dari hasil Survei Daya Saing

Daerah (SDSD) 2010. Indeks rata-rata kinerja investasi di provinsi ini menunjukkan angka terendah dari enam indikator.

Survei Daya Saing Daerah 2010 merupakan gabungan Survei Iklim Usaha (Business Climate Survey – BCS 2007) dan Pro-Investasi. Survei Iklim Usaha diselenggarakan oleh Harian Suara Merdeka, Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng, GTZ-Red (lembaga kerja sama Indonesia-Jerman, yang sekarang berganti nama menjadi GIZ-Red), dan beberapa personel perguruan tinggi. Adapun Pro-Investasi merupakan program tahunan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng untuk memantau kinerja investasi kabupaten/kota di Jateng.

Survei Daya Saing Daerah tersebut dilanjutkan dengan serangkaian survei yang lain, yaitu Survei Snapshot 2011 yang memantau responsivitas kabupaten/kota, Survei Investasi 2012 untuk merekam beragam kebutuhan dan persoalan investor

di 35 kabupaten/kota di Jateng, dan SDSD 2013. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan usaha peningkatan investasi, mulai dari kebijakan, pelayanan, hingga fasilitas-fasilitas pendukung yang lain.

Survei Investasi Jawa Tengah 2012 dilakukan bersama oleh BPMD, Bappeda, KBI Semarang, Budi Santoso Foundation (BSF), didukung oleh GIZ-Red, dan beberapa personel dari perguruan tinggi.

Kegiatan dimulai melalui kesepakatan bersama, Maret 2012. Setelah itu dibuat desain survei dan draf kuesioner yang mengalami beberapa kali perombakan. Pada tahap berikutnya dilakukan pelatihan surveyor dan uji coba kuesioner (Juli 2012), penentuan responden (Agustus-September 2012), penggalan data lewat wawancara dengan responden (Oktober-November 2012), validasi data (November 2012), pengolahan data (Desember 2012), hingga hasil awalnya dipresentasikan di

kantor BPMD pada 18 Desember 2012.

Responden terdiri dari 239 pengusaha/investor di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang sudah beroperasi sekurang-kurangnya selama tiga tahun, dengan nilai investasi minimal Rp 500.000.000.

Permasalahan

Hasil serangkaian survei (BCS 2007, SDS 2010, Survei Snapshot 2011, dan Survei Investasi 2012) menunjukkan adanya tiga tantangan utama Jateng, yaitu kinerja investasi, infrastruktur, dan kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, kalau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota se-Jateng benar-benar berkehendak meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka tiga tantangan utama itulah yang harus ditangani secara serius.

Indikasi tiga tantangan utama itu sudah terlihat dari hasil BCS 2007. Disebutkan, 38% responden di Jateng menilai iklim usaha lebih buruk dibandingkan dua tahun lalu (2005), 35% menilai lebih baik. Lima masalah

utama yang dirasakan oleh pengusaha adalah persaingan usaha, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan birokrasi. Selain itu, isu infrastruktur berada pada urutan yang tinggi. Kurang lebih 50% responden tidak setuju atau sebagian tidak setuju dengan pernyataan “pemerintah mampu memberikan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan operasional usaha.”

Lebih 34% responden menyebutkan dukungan terhadap usaha sebagai prioritas utama. Perbaikan infrastruktur pada urutan kedua, diikuti pemberantasan korupsi dan kolusi dan mengurangi birokrasi. Sebanyak 38% pengusaha tidak melihat adanya perubahan dalam kinerja birokrasi selama dua tahun terakhir, sedangkan 29% mendapatkan kesan bahwa birokrasi telah menjadi lebih mudah, 8% dari responden memiliki anggapan bahwa birokrasi telah menjadi lebih buruk.

Hasil SDS 2010 lebih jelas lagi menggambarkan, bahwa kinerja investasi, infrastruktur, dan kinerja birokrasi pemerintah

merupakan tantangan utama. Survei ini menyimpulkan bahwa peringkat tantangan Jateng ke depan adalah kinerja investasi (skor 2,12 dari skala 1-10), disusul infrastruktur (4,48), kinerja pemerintah (4,57), persepsi iklim bisnis (5,09), kinerja ekonomi (5,14), dinamika usaha (5,84).

Indikator kinerja investasi antara lain: realisasi investasi, jumlah tenaga kerja yang direkrut, dan penilaian terhadap daya tarik kabupaten/kota untuk investasi. Indikator infrastruktur: jalan daerah (tanggung jawab kabupaten/kota) yang beraspal, penilai pemeliharaan dan pengembangan, jumlah pasar per seribu penduduk, ketersediaan dan kualitas lembaga pelatihan kejuruan, dan jumlah lembaga keuangan. Indikator kinerja pemerintah: kapasitas pemerintah (anggaran per kapita, pendapatan asli daerah/PAD terhadap total pendapatan, peningkatan PAD, belanja pembangunan dan kenaikannya); usaha pemerintah (studi terbaru peluang investasi, ketersediaan materi promosi investasi, frekuensi/kualitas

ekspo/fair yang difasilitasi, kualitas kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu / Ones Stop Service, perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan, anggaran promosi, regulasi pro-investasi).

Tiga tantangan utama tersebut juga nampak dalam hasil Survei Snapshot 2011. Hal itu terutama tergambar pada tingkat responsivitas kabupaten/kota yang masih relatif rendah terhadap kondisi yang terekam SDSA 2010.

Lima besar peraih skor tinggi adalah Kota Surakarta (8,11), Kabupaten Purbalingga (7,75), Rembang (7,69), Kota Magelang (7,29), Demak (7,19). Sedangkan lima terendah adalah Kabupaten Pekalongan (4,55), Wonosobo (4,46), Pemalang (4,04), Batang (3,65), dan Kudus (3,36). Data itu menunjukkan rendahnya tingkat responsivitas pemerintah kabupaten/kota terhadap kondisi yang ada, terutama kinerja investasi, infrastruktur, dan kinerja birokrasi. Tercatat, 14 kabupaten/kota memperoleh skor di bawah rata-rata (5,7). Artinya,

tingkat responsivitas mereka rendah.

Dari hasil Survei Investasi 2012 diketahui, peraturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sebagai regulasi yang menghambat (dinyatakan oleh 18,57% responden). Disusul kemudian, peraturan yang berkaitan dengan registrasi usaha (15,61%), peraturan berkaitan dengan izin investasi (10,97%), peraturan berkaitan tenaga kerja (9,70%), peraturan lingkungan hidup (7,59%), peraturan tata ruang (5,49%).

Sebanyak 39,24% responden mengaku perlu mengeluarkan biaya tidak resmi (pungli) untuk kelancaran usaha mereka, 60,76% menyatakan tidak perlu. Biaya tidak resmi terbesar untuk memperoleh perizinan (39,51%), disusul pengamanan di lingkungan usaha (22,84%), biaya inspeksi (12,96%), dan surat-surat administratif di tingkat kecamatan (11,73%).

Hasil lain Survei Investasi 2012 juga menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok dalam hal daya tarik investasi

antarkabupaten/kota menurut persepsi pengusaha. Peringkat tertinggi (Banjarnegara) mendapat skor 8,93, namun 16 kabupaten/kota mendapat skor di bawah rata-rata (4,965).

Dalam indikator perawatan dan pengembangan infrastruktur ada peningkatan. Tujuh kabupaten (Sukoharjo, Kudus, Pati, Rembang, Sragen, Purworejo, dan Banyumas) dinilai baik (10,00). Tiga kabupaten mendapat skor di bawah rata-rata (5,5), yaitu Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Blora.

Sembilan kabupaten/kota (Sukoharjo, Kudus, Pati, Sragen, Purworejo, Kota Tegal, Demak, Grobogan, Kabupaten Pekalongan) dinilai “sempurna” (10) dalam konsistensi perilaku pejabat. Tapi, 10 yang lain mendapat skor di bawah rata-rata (5,5).

Uraian tersebut makin memperjelas, bahwa tantangan Provinsi Jawa Tengah adalah kinerja investasi, infrastruktur, dan kinerja pemerintah. Tiga tantangan itu dapat dirangkum menjadi dua tantangan utama, yaitu infrastruktur dan kinerja pemerintah, karena kinerja

investasi sangat dipengaruhi oleh dua indikator tersebut.

Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memprioritaskan penanganan infrastruktur dan melakukan reformasi birokrasi secara tepat, maka kinerja investasi niscaya akan meningkat. Investasi yang meningkat akan memperbesar lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Metodologi Penelitian

1. Survei Iklim Usaha 2007:

Survei Iklim Usaha (Business Climate Survey – BCS) 2007 mengukur daya saing ekonomi 35 kabupaten/kota di Jateng dan daya saing ekonomi ke-6 wilayah karesidenan. Untuk wilayah karesidenan, BCS menggunakan pendekatan wilayah administratif yang digunakan zaman dulu, yakni eks Karesidenan Surakarta, Pati, Semarang, Kedu, Banyumas dan Pekalongan.

Daya saing ekonomi didefinisikan berdasarkan beberapa sub-indeks, yaitu kinerja

ekonomi, persepsi terhadap iklim usaha, infrastruktur, kapasitas pemerintah daerah, efisiensi pemerintah daerah, dan dinamika usaha. Tiap-tiap sub-indeks berisi satu set data yang diperoleh dari sumber-sumber data statistik dan dari wawancara dengan 1.680 pemilik perusahaan serta para manajer perusahaan.

2. Survei Daya Saing Daerah 2010:

Survei Daya Saing Daerah di Jateng 2010 menggunakan pendekatan/metode proporsional (strata survei); total responden di tiap-tiap kabupaten/kota adalah sama rata atau proporsional. Adapun total sampling survei adalah 2.100 responden, mencakup 1.995 responden dari kalangan pengusaha (57 pengusaha per kota/kabupaten) dan 105 responden dari pejabat pemerintah (tiga pejabat pemerintah per kabupaten/kota). Responden pengusaha meliputi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Indikator penilaian keseluruhan daya saing daerah didasarkan pada enam sub-indeks, terdiri dari sub-indeks kinerja

ekonomi (terdiri dari enam indikator), persepsi iklim usaha (delapan indikator), kinerja pemerintah (terdiri dari dua sub-sub indeks yakni sub-sub indeks kapasitas pemerintah dan upaya pemerintah dengan total 15 indikator), kinerja investasi (sembilan indikator), dinamika bisnis (lima indikator) dan infrastruktur (lima indikator).

Survei ini difokuskan untuk menghargai upaya pemerintah dalam mendorong iklim usaha dan investasi, sehingga hasil akhir dari penilaian diberikan pembobotan. Pembobotan yang utama pada sub-indeks kinerja pemerintah dan sub-indeks investasi (masing-masing 25 persen), sedangkan sub-indeks yang lain masing-masing 12,5 persen.

Survei lapangan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2010 dengan metode wawancara langsung antara *surveyor* terlatih dengan responden. Sumber data hasil survei diolah bersama-sama dengan data statistik dengan menggunakan *software* khusus untuk menghitung indeks dan

sub-indeks secara otomatis dalam skala 1–10. Hal ini menjamin objektivitas hasil penelitian.

3. Survei Snapshot 2011

Survei ini mengukur lima indeks pembangunan daerah, yaitu persepsi iklim bisnis (dengan indikator: konsisten pejabat, regulasi menghambat, pungutan liar); kinerja pemerintah (kontribusi PAD terhadap total pendapatan, kualitas program investasi pemerintah, kualitas layanan PPTSP); kinerja investasi (persentase jumlah perusahaan yang berinvestasi 12 bulan terakhir, daya tarik investasi); infrastruktur (kualitas pembangunan dan perawatan, anggaran belanja modal); dan dinamika bisnis dengan indikator tingkat aplikasi kredit.

Survei Snapshot menganut prinsip *cost-effectiveness*. Survei hanya ditujukan untuk memantau tingkat tanggapan dan tindak lanjut guna perbaikan oleh pemerintah kabupaten/kota atas saran dan temuan hasil SDSD 2010. Karena itu sampel responden, pengumpulan data, dan proses analisis dilakukan sesederhana mungkin.

Sampel Responden: pemda dan pengusaha; komposisi responden sama dengan SDSD 2010; jumlah responden 10 swasta dan dua pemda; distribusi responden: pengusaha mikro dan kecil (6), menengah (3) dan besar (1); pemerintah: 4 pejabat (bidang perekonomian).

Pengumpulan data responden swasta dilakukan dengan metode penyusunan panel, yaitu: mengumpulkan data perusahaan dari *database* SDSD 2010; meminta komitmen responden untuk menjadi responden kembali pada survei paska-SDSD 2010 maupun SDSD 2013; memberikan sampel kuesioner kepada responden (jika perlu); melaksanakan wawancara melalui telepon; melaksanakan entri data hasil dari wawancara; pengolahan data menggunakan *software* "Snap 10 Evaluation".

4. Survei Investasi 2012:

Survei ini mengumpulkan informasi dari para pengusaha yang dilaksanakan pada kurun waktu tertentu untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik dan pola perilaku

investor dalam mengambil keputusan investasi dan korelasinya terhadap hasil keputusannya (seperti moda investasi, kinerja investasi investor, penilaian terhadap iklim bisnis, dan layanan pemerintah).

Responden terdiri dari investor yang sudah ada di kabupaten/kota, dengan kriteria sudah beroperasi/berusaha, memiliki nilai investasi lebih dari Rp 500 juta, investor asing/domestik, minimal memiliki salah satu izin operasi dan/atau izin usaha tetap, dan masih aktif. Investor asing adalah perorangan/badan hukum/milik negara; sumber modal sebagian dan/atau sepenuhnya dari modal asing. Investor domestik terdiri dari perorangan/badan hukum/milik negara dan sumber modal dalam negeri.

Fokus penggalan informasi: profil investor, alasan melaksanakan investasi, persepsi secara umum tentang lokasi investasi. Selain itu juga biaya administratif dan regulasi untuk investasi, penilaian terhadap layanan promosi investasi saat ini,

dan layanan tambahan bagi investor.

Hasil survei investasi Jawa Tengah 2012 dibangun dengan menggunakan gabungan berbagai indikator.

Pertama, indikator yang berasal persepsi investor, terdiri dari 12 sub-indikator, yaitu: (1) rata-rata penilaian daya tarik investasi, (2) pembangunan dan perawatan infrastruktur, (3) konsistensi pejabat pemerintah, (4) biaya tak resmi (pungutan liar/illegal), (5) rencana perluasan usaha, (6) kesesuaian kinerja pemerintah dengan harapan investor, (7) jumlah regulasi yang menghambat investasi, (8) efisiensi pelayanan perizinan, (9) rata-rata kualitas pelayanan yang penting pada pra-investasi, (10) rata-rata kualitas pelayanan yang penting pada paska-investasi, (11) tingkat kepuasan pada kinerja pemerintah kabupaten/kota, (12) kapasitas petugas pelayanan dan perizinan investasi.

Kedua, indikator yang berasal dari data statistik, terdiri dari: (1) pertumbuhan kredit modal kerja, (2) pertumbuhan kredit investasi, dan (3)

pertumbuhan anggaran pembangunan.

Dalam penghitungan kinerja investasi secara keseluruhan, total indikator yang berasal dari persepsi investor diberi bobot 50%, sedangkan indikator pertumbuhan modal kerja dan pertumbuhan anggaran masing-masing 20%, serta indikator pertumbuhan anggaran belanja pembangunan 10%.

Pengumpulan data dalam semua survei tersebut dilakukan dengan wawancara langsung (*face to face*) antara surveyor dan responden. Secara garis besar, semua data survei terdiri dari: data kualitatif berupa persepsi pengusaha (dan pemerintah) tentang subindeks dan indikator, serta data kuantitatif terdiri dari data statistik yang terkait. Dengan demikian, tingkat objektivitas hasilnya dapat terjamin.

Uraian berikut ini dititikberatkan pada hasil Survei Investasi 2012, sebagai survei terbaru sebelum memulai Survei Daya Saing Daerah 2013 (yang sedang berlangsung saat tulisan ini disusun).

Pembahasan

Berikut ini hasil Survei Investasi 2012, yang dijelaskan per indeks:

1. Indeks Kinerja Investasi Kabupaten/Kota

Indeks ini merupakan gabungan (*overall*) dari indikator-indikator persepsi investor (12 subindikator) yang secara keseluruhan diberi bobot 50%, indikator-indikator data statistik yaitu pertumbuhan modal kerja (20%), pertumbuhan investasi (20%), serta pertumbuhan anggaran belanja modal/pembangunan yang diberi bobot 10%.

Skor dalam indeks menunjukkan upaya atau kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam menarik investasi, menurut persepsi investor dan data statistik. Faktor yang diukur bukan besaran investasi, melainkan kinerja pemerintah kabupaten/ kota. Oleh sebab itu, kabupaten/kota yang menduduki peringkat tinggi belum tentu angka investasinya besar. Dengan kata lain, survei ini mengapresiasi kinerja pemerintah

kabupaten/kota dalam menerapkan program-program yang dapat menjadi “magnet” investor menanamkan modal di kabupaten/kota tersebut.

Dilihat dari skor yang diperoleh tiap-tiap kabupaten/kota, secara keseluruhan sesungguhnya daya tarik investasi kabupaten/kota di Jateng belum memuaskan, karena dari skala 1 sampai 10, angka tertinggi adalah 6,51 (Kabupaten Wonosobo) dan angka terendah 4 (Kabupaten Wonogiri). Hal ini menunjukkan, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan, agar skor tersebut meningkat.

Dilihat dari kecilnya selisih skor antar-kabupaten/kota, maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan daya tarik antara kabupaten/ kota tidaklah besar. Data itu cukup menggembirakan, namun kalau dilihat dari skor yang berada dalam rentang 4 sampai dengan 6,51, maka pemerintah kabupaten/kota perlu bekerja lebih keras lagi, agar skor tersebut meningkat.

Idealnya, kesenjangan tidak terlalu besar, namun secara

bersama-sama dapat menaikkan skor mendekati angka 10. Kalau hal itu bisa terjadi, maka secara keseluruhan daya tarik investasi Jateng pun meningkat, sehingga berdampak positif pada peningkatan perekonomian, perluasan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

2. Indeks Persepsi Investor

Daerah yang mendapat apresiasi tertinggi dari para investor di wilayahnya adalah Kabupaten Sragen (skor indeks 4,18). Sedangkan Wonosobo, yang tertinggi di tingkat kinerja *overall* tetap berada di posisi tinggi (peringkat ke-4, dengan skor 3,82). Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan peringkat terbawah dalam *overall*, berada di posisi ke 33 (indeks 2,35). Sementara posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Karanganyar (1,65).

Jika disimak, sebenarnya secara keseluruhan, angka yang diperoleh kabupaten/kota tidak menggemblirakan, karena skor indeks tertinggi hanya 4,18, terendah 1,65 dari skor maksimal

10. Dari paparan data sekilas itu, dapat dengan mudah diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan terdapat kesenjangan antara kebutuhan investor dan pelayanan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan investasi di daerahnya.

Tantangan yang paling besar tentu saja dihadapi oleh Kabupaten Karanganyar, yang memiliki skor indeks 1,65. Artinya, hampir di seluruh 12 sub-indikator persepsi investor, angka yang didapat sangatlah rendah.

3. Indeks Pertumbuhan Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja biasanya digunakan untuk menyelesaikan operasi usaha sehari-hari yang lebih berjangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji pekerja, dan lain-lain. Kredit modal menjadi salah satu penanda aktivitas ekonomi yang penting di suatu wilayah. Makin tinggi kredit modal kerja di suatu wilayah, makin tinggi juga aktivitas ekonomi yang telah berjalan (*on going*) di wilayah itu.

Pada indeks pertumbuhan kredit modal di bagian ini, yang diukur bukan besaran kredit, melainkan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, dari tahun 2010 hingga 2012. Jika pertumbuhan itu positif, maka skor indeks pun makin tinggi. Sebaliknya, jika pertumbuhan negatif –sebut saja, kredit akumulatif di suatu wilayah di tahun 2010 lebih tinggi dibanding tahun-tahun selanjutnya, maka skor indeksnya akan minimal sekali.

Kabupaten Blora dan Grobogan –daerah yang biasanya tidak terlalu diperhitungkan dalam aktivitas ekonominya—menunjukkan skor indeks yang tinggi dalam pertumbuhan kredit modal kerja, dengan skor 10,00 dan 7,21. Sementara indeks pertumbuhan terendah terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan (1,00) dan Kabupaten Cilacap (1,48).

4. Indeks Pertumbuhan Kredit Investasi

Berbeda dari kredit modal kerja, kredit investasi biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan operasi perusahaan

jangka panjang, misalnya membuka investasi baru atau mengembangkan usaha. Kredit investasi dipakai juga sebagai penanda adanya aktivitas-aktivitas usaha baru di suatu wilayah.

Di bagian ini, yang diukur bukanlah besaran kreditnya, melainkan pertumbuhannya dari 2010 – 2012. Wilayah yang menonjol adalah Kota Pekalongan (skor indeks 10,0), Kabupaten Magelang (8,22), Demak (7,82), Kudus (7,51), dan Surakarta (7,10). Sementara yang paling kecil adalah Kabupaten Kendal (1,00), Rembang (1,46), Sragen (1,47).

5. Indeks Pertumbuhan

Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan merupakan komponen penting dari pemerintah untuk mengakselerasi aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayahnya. Diasumsikan, jika belanja pembangunan tinggi, maka otomatis aktivitas pembangunan yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah daerah itu juga akan tinggi

Di bagian ini, yang diperhitungkan adalah pertumbuhan belanja pembangunan dari tahun 2010-2012. Kabupaten Kendal, Purworejo sangat maksimal pertumbuhan belanja modalnya (skor 10,00). Kota Surakarta juga menonjol, dengan skor 9,59.

Temuan-temuan

1. Daya Tarik Investasi Jateng

Mayoritas (67,90%) pengusaha memilih Jateng sebagai lokasi menanamkan modal mereka didasarkan pada alasan lokasi yang mudah untuk menjangkau bahan baku (40,51%) dan menjangkau pasar/penjualan (26,58)).

Data tersebut menunjukkan, bahwa mayoritas pengusaha menginvestasikan modal di wilayah yang dekat dengan keberadaan mereka (misalnya: tempat tinggal, kemudahan membuka akses, kemudahan memperoleh perizinan operasional). Dengan kata lain, sebagian besar investor di kabupaten/kota adalah pengusaha dari wilayah Jateng,

meskipun mereka juga mengembangkan usaha ke daerah lain.

Jawaban responden juga menunjukkan, bahwa produktivitas dan biaya tenaga kerja bukan merupakan faktor keunggulan Jateng dalam menarik investasi. Hanya $10,13\% + 2,11\% = 12,24\%$ responden yang menyebut dua faktor itu menjadi pendorong mereka berinvestasi di Jateng. Begitu pula infrastruktur, juga belum menjadi faktor pendukung investasi, hanya disebut oleh 4,22% responden.

2. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota

Mirip dengan alasan memilih Jateng sebagai tempat investasi, mayoritas (60,76%) pengusaha juga menyatakan, bahwa alasan pemilihan kabupaten/kota adalah lokasi geografis yang ideal. Hal yang menarik adalah, 15,19% pengusaha menyatakan “secara kebetulan” memilih kabupaten/kota. Hanya 2,53% pengusaha yang menyebut *marketing* proaktif dari pemerintah kabupaten/kota dan hanya 4,22% yang

mengemukakan, infrastruktur yang ideal sebagai faktor pendorong mereka berinvestasi. Hal ini menunjukkan, bahwa dua faktor tersebut belum menjadi faktor pendorong, sehingga pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian yang serius.

3. Gambaran Investasi Tiga Tahun Terakhir Pemerintah

kabupaten/kota layak berbangga, karena mayoritas (62,03%) responden mengaku investasi yang mereka jalankan selama tiga tahun terakhir sudah sesuai harapan. Hanya 2,53% dari mereka yang menyatakan investasi itu jauh dari harapan, 19,83% menyatakan di bawah harapan dan 2,53% yang mengaku investasi di kabupaten/kota (tempat mereka berinvestasi) itu menguntungkan.

Data ini menggambarkan masih ada “pekerjaan rumah” bagi kabupaten/kota untuk melancarkan kiat-kiat jitu dalam memberikan kepuasan bagi investor sebagai konsumen mereka (*customer satisfaction*).

Pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan nilai dari sisi investor (*value from investor's stand point*), sehingga akan makin banyak investor yang menanamkan modal.

4. Regulasi paling menghambat

Peraturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah dinilai sebagai regulasi paling menghambat investasi. Disusul kemudian peraturan yang berkaitan dengan registrasi usaha, misalnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan (HO - *Hinder Ordonantie*), dan IUT (Izin Usaha Tetap).

Data ini merupakan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota, bahwa salah satu langkah untuk menarik investor adalah deregulasi pajak dan retribusi daerah. Artinya, pemerintah kabupaten/kota perlu mengubah *mindset* “sekadar berorientasi mengejar pendapat asli daerah (PAD) lewat pajak dan retribusi” ke arah *mindset* yang lebih cerdas, yaitu “regulasi pro-

investasi, yang pada akhirnya juga meningkatkan PAD.”

5. Pembebanan pajak dan retribusi daerah

Besaran pajak ternyata merupakan faktor yang paling membebani para investor (disebut oleh 39,41% responden). Disusul kemudian jumlah jenis pajak (34,32%), dan prosedur penagihan (17,80%). Data ini menunjukkan, cukup banyak pengusaha yang merasa keberatan terhadap besaran pajak dan retribusi daerah yang harus mereka bayar dalam kegiatan usaha, begitu pula terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, prosedur penagihan dianggap bukan merupakan faktor yang signifikan. Dilihat secara keseluruhan, memang masih lebih banyak pengusaha yang menganggap besaran, jenis, dan prosedur bukan merupakan beban dalam hal pajak dan retribusi daerah. Meskipun demikian, angka responden yang merasa terbebani adalah sinyal bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah, kalau ingin

menarik investasi lebih banyak lagi ke daerahnya.

6. Biaya tidak resmi

Dalam setiap survei, masalah biaya tidak resmi (atau pungutan liar, alias pungli) selalu menarik.

Pemerintah kabupaten/kota yang angka pungli (relatif) besar biasanya langsung bereaksi, bahkan tidak sedikit yang protes pada penyelenggara survei. Hal yang perlu diingat adalah, angka (atau persentase) pungli itu diperoleh dari data kualitatif, yaitu persepsi (yang merupakan hasil dari pengalaman responden) yang diungkapkan kepada surveyor.

Dari keseluruhan responden, 60,76% menyatakan “tidak perlu mengeluarkan biaya tidak resmi untuk urusan-urusan bisnis”, tapi 39,24% di antara mereka menyebutkan “perlu mengeluarkan biaya tidak resmi untuk memperlancar urusan bisnis.” Angka 39,24% tersebut bukanlah angka yang kecil untuk kinerja investasi, apalagi di tengah-tengah upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Di antara pengusaha yang menjawab “perlu membayar biaya tidak resmi untuk memperlancar bisnis” sebanyak 39,51% mengaku pungli itu dilakukan untuk mendapatkan perizinan. Disusul kemudian untuk mendapatkan pengamanan di lingkungan usaha. Jadi, soal izin dan keamanan lingkungan merupakan dua faktor yang “rawan pungli”, sehingga pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian khusus pada dua faktor tersebut.

Soal perizinan menyangkut petugas-petugas pemerintah yang menangani perizinan bagi kalangan pengusaha, adapun soal keamanan lingkungan menyangkut aparat keamanan (resmi) maupun elemen masyarakat yang memanfaatkan faktor ini untuk memperoleh keuntungan, baik secara pribadi maupun kelompok.

7. Dukungan Pemerintah Mayoritas (51,05%) pengusaha menyatakan pemerintah sudah memberikan dukungan dalam kegiatan bisnis mereka. Bahkan, 17,72%

pengusaha mengaku pemerintah sangat mendukung. Hanya 1,27% yang menyatakan pemerintah tidak mendukung dan 27,43% menilai pemerintah kurang mendukung. Data ini merupakan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mempertahankan citra yang sudah cukup baik di mata investor, namun tidak membuat lengah dan abai memperbaiki kinerja.

Kesimpulan

Secara umum, para pengusaha merasa dukungan pemerintah bagi iklim investasi sudah cukup memadai. Tapi, kalau segala aspek dukungan itu diurai dalam berbagai subindikator, ternyata indeks persepsi investor terhadap iklim investasi yang dibangun tiap-tiap pemerintah daerah tidak mengembirakan, tergambar dari skor indeks tertinggi hanya 4,18 (Kabupaten Sragen), dan terendah Kabupaten Karanganyar (1,65).

Dorongan untuk berinvestasi pertama kali, atau untuk mengembangkan investasi selanjutnya, lebih ditentukan oleh faktor-faktor yang diusahakan

investor sendiri daripada usaha pemerintah untuk menarik investasi. Di antara faktor-faktor itu, “dekat dengan pasar”, “ketersediaan bahan baku”, “letak geografis yang sesuai untuk usaha” menjadi penentu penanaman dan pengembangan modal, dibanding, misalnya, dengan “*marketing* yang proaktif pemerintah (daerah).

Hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan regulasi adalah peraturan tentang pajak dan retribusi daerah. Regulasi ini oleh sebagian besar pengusaha dipandang sebagai peraturan yang paling menghambat, disusul peraturan yang berkaitan dengan registrasi usaha (TDP, HO, SIUPP, IUT, dll). Sementara, peraturan berkaitan dengan tata ruang adalah regulasi yang paling sedikit dikomplain. Meskipun regulasi pajak-retribusi dipandang sebagai paling membebani, bagi mayoritas responden membayar pajak bukan kewajiban yang membebani mereka. Beban paling dirasakan adalah besaran dan jenis pajak.

Pernyataan pengusaha tentang regulasi tersebut merupakan tantangan pemerintah (baik daerah maupun pusat) untuk merevisi peraturan-peraturan yang menghambat, agar lebih pro-investasi. Di sinilah terletak arti pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memberikan iklim usaha yang kondusif.

Biaya tidak resmi (pungli) juga masih menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut terlihat dari jumlah responden (39,24%) yang mengakui masih harus mengeluarkan uang untuk biaya tidak resmi demi kelancaran berbagai urusan bisnis. Untuk urusan apa? Ternyata paling tinggi adalah urusan perizinan, disusul pengamanan di lingkungan usaha, biaya inspeksi, dan surat-surat administratif di kecamatan.

Data tentang pungli tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah konkret meminimalisasi biaya tidak resmi, agar investor merasa lebih nyaman berinvestasi di daerahnya. Pemeo “Kalau bisa

dipersulit, mengapa harus dipermudah” sebaiknya dibalik menjadi “Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit.”

Seperti ditekankan pada awal tulisan ini, maka data hasil serangkaian survei daya saing daerah di Jateng membuktikan bahwa tantangan utama Jateng untuk meningkatkan investasi adalah pembenahan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Dua faktor tersebut harus ditangani serius, kalau pemerintah (kabupaten/kota dan provinsi Jateng) benar-benar ingin memajukan wilayahnya.

Rekomendasi

Pemerintah sebaiknya mendukung beberapa faktor penting kebutuhan investasi yang dirasa vital oleh para investor yang terungkap dalam survei, yaitu informasi tentang pasar, bahan baku, iklim usaha yang nyaman, serta prosedur perizinan usaha yang transparan. Hal ini dapat dikaitkan dengan “misi” pemerintah daerah untuk mengangkat harkat martabat wilayahnya, dalam hal ini termasuk menyediakan lapangan

kerja bagi masyarakat, lewat berbagai aktivitas ekonomi yang dibangun melalui berbagai usaha yang dikembangkan oleh investor.

Masalah-masalah “klasik” dalam investasi, seperti ragam pajak dan retribusi yang tidak jelas, pungutan liar, layanan perizinan usaha yang belum sesuai harapan, seharusnya segera dipangkas. Pemangkasan menjadi faktor penting akselerasi ekonomi di suatu wilayah. Sebaliknya, pembiaran terhadap masalah akan memperburuk kinerja dan nama baik daerah.

Dalam iklim yang terbuka seperti sekarang, dengan banyak lembaga yang terlibat untuk menyiorotinya, “kebaikan” dan “keburukan” itu sangat mudah diketahui. Oleh sebab itu, kabupaten/kota, secara ideal, harus berlomba-lomba memangkas regulasi yang menghambat serta meningkatkan pelayanan perizinan investasi.

Apa yang perlu dilakukan?

Ada cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam menarik investasi. Kata

kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Pemerintah kabupaten/ kota perlu meningkatkan dua faktor penting itu, yang selama ini justru sering terabaikan.

Komunikasi dan koordinasi harus terus ditingkatkan antara lembaga pelayanan-perizinan dengan SKPD terkait, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga legislatif, dan pemerintah kabupaten/kota tetangga. Media dan LSM perlu “dirangkul” agar mendukung program-program penanaman modal. Lembaga legislatif perlu diajak koordinasi dalam hal melahirkan regulasi-regulasi ramah investasi. Begitu pula pemerintah kabupaten/kota tetangga, perlu diajak komunikasi dan koordinasi, karena sekaranglah era “*regional marketing – regional economy*” yang memerlukan kerja sama antar-wilayah.

Secara lebih jelas, langkah konkret yang dapat ditempuh pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut:

- a. Memperbanyak regulasi pro-investasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sinergi antara eksekutif (terutama lembaga pelayanan-perizinan investasi) dengan pihak legislatif;
- b. Membenahi infrastruktur dilakukan dengan cara meningkatkan sinergi antar-SKPD, karena masalah investasi merupakan tanggung jawab bersama semua SKPD, misalnya dengan Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan raya, dengan Dinas Pasar yang menangani masalah pasar, dan seterusnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebaiknya difokuskan untuk penanganan infrastruktur.
- c. Menekan biaya tidak resmi dapat dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi (misalnya: menindak tegas petugas yang menyebabkan munculnya pungli) serta menegakkan peraturan/hukum;
- d. Meningkatkan daya dukung pemerintah dengan cara menerapkan prinsip

“pemerintah sebagai fasilitator”, pemerintah sebagai *pamong praja* (bukan *pangrèh praja*), sehingga memberi peran lebih kepada swasta sebagai pelaku.

Menyimak kebijakan serta visi-misi gubernur baru, Ganjar Pranowo, nampaknya ada harapan mencapai Jateng yang lebih baik dalam kinerja investasi. Setidak-tidaknya hal itu terlihat dari

komitmen Ganjar terhadap prioritas penggunaan anggaran untuk pembenahan infrastruktur dan wacana tentang reformasi birokrasi. Mudah-mudahan komitmen dan wacana itu benar-benar terwujud secara nyata.

- Dr. Adi Ekopriyono, MSi, dosen Fakultas Ekonomi / Magister Management Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.